

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi yang semakin pesat, jasa telekomunikasi terus berkembang dan memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya jaringan telekomunikasi, proses penyampaian informasi jarak jauh dapat disampaikan dengan cepat kapan pun dimana pun tanpa menghabiskan banyak waktu. Dan saat ini ada banyak jenis telekomunikasi untuk menyampaikan informasi tersebut. Semua ini terbukti dengan terus bertambahnya perusahaan yang membangun usaha di bidang telekomunikasi dan meningkatnya persaingan di bidang ini.

Pendapatan merupakan tujuan utama dari didirikannya satu perusahaan. Pada perusahaan jasa, pendapatan merupakan umpan balik dari jasa yang telah diberikan. Pencatatan atas pendapatan pada laporan keuangan pun harus diperhatikan pengakuan dan pengukurannya. Keakuratan atas pengakuan dan pengukuran pendapatan sangat berkaitan. Apabila pendapatan tidak diakui pada saat yang tepat, informasi laba yang tersaji dalam laporan keuangan akan dinyatakan terlalu besar atau terlalu kecil. Sehingga laporan keuangan terutama laporan laba rugi tidak mencerminkan

keadaan yang sebenarnya yang terjadi selama periode laporan tersebut. Dengan demikian laporan keuangan tersebut akan mengakibatkan pemakai laporan akan salah mendapatkan informasi mengenai pendapatan perusahaan.

Saat ini, ada beragam industri di Indonesia dengan berbagai macam usaha yang dihasilkan. Keragaman usaha yang dihasilkan tersebut membuat tidak semua industri dapat mencatat pendapatan mereka dengan perlakuan yang sama karena kespesifikan usaha masing-masing. Perusahaan jasa khususnya industri telekomunikasi umumnya memperoleh pendapatan dari jasa selular, jasa telekomunikasi tetap, dan jasa telekomunikasi lainnya yang membantu masyarakat berkomunikasi dengan mudah. Dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi tersebut, perusahaan memiliki suatu keterhubungan (interkoneksi), yaitu suatu hubungan jaringan telekomunikasi antar satu penyelenggara jaringan dengan jaringan lain di dalam maupun di luar negeri. Hal tersebut menimbulkan masalah mengenai bagaimana perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi tersebut mengakui dan mengukur pendapatan yang menjadi hak dan kewajiban pihak-pihak terkait.

Ikatan Akuntan Indonesia (I.A.I) yang merupakan organisasi profesi akuntan di Indonesia, telah membuat standar akuntansi keuangan yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang salah satunya membahas Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi. Standar tersebut

dibuat agar tidak terjadi penyimpangan oleh perusahaan-perusahaan telekomunikasi, yang dapat dijadikan pedoman dalam pengakuan, pengukuran, serta pengungkapan pendapatan bagi perusahaan telekomunikasi, yaitu PSAK 35 yang efektif sejak 1 Januari 1995.

Adanya harmonisasi untuk menyamakan pengaturan standar akuntansi di dunia yang dicanangkan oleh *International Accounting Standards Committee* (IASC), tidak mengharuskan adanya kesamaan pengaturan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi usaha suatu entitas. Tetapi target harmonisasi ini berubah ketika Uni Eropa pada tahun 2002 memutuskan untuk mengimplementasikan *International Financial Reporting Standards* (IFRS) bagi seluruh *listed companies* pada tingkat konsolidasian di tahun 2005. Program harmonisasi menjadi kurang tepat, sehingga IASB sejak saat itu mencanangkan program konvergensi. Artinya, seluruh negara anggota IASB diwajibkan untuk menggunakan IFRS sebagai acuan pencatatan transaksi sepanjang IFRS sudah mengatur standar akuntansi untuk transaksi tersebut.

Indonesia pun turut serta melaksanakan program konvergensi. Sehingga, dalam perkembangan penyusunan standar akuntansi di Indonesia oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) tidak dapat terlepas dari perkembangan penyusunan standar akuntansi internasional yang dilakukan oleh *International Accounting Standards Board* (IASB).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada perayaan HUT-nya yang ke 51 pada 23 Desember 2008 telah mencanangkan konvergensi dengan IFRS pada tahun 2012. Dan pada bulan Juni 2009 silam, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (DSAK) telah mengeluarkan Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan No.1 (PPSAK 1) mengenai Pencabutan PSAK 32: Akuntansi Kehutanan, PSAK 35: Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi, dan PSAK 37: Akuntansi Penyelenggaraan Jalan Tol yang mulai efektif sejak 1 Januari 2010.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi mengenai pengakuan pendapatan jasa telekomunikasi setelah dihapuskannya PSAK 35 tersebut.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengakuan pendapatan perusahaan setelah tidak menerapkan PSAK 35?
2. Apa saja dampak dari penghapusan PSAK 35 bagi perusahaan?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan
 - a. Mengetahui dampak-dampak yang timbul dari penghapusan PSAK 35 pada PT. Telkom.

- b. Mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi atas pendapatan PT. telkom saat ini setelah tidak menerapkan PSAK 35.

2. Manfaat Penulisan

- a. Bagi perusahaan (PT. Telkom)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi masukan bagi perusahaan atau evaluasi mengenai perlakuan baru atas pendapatan interkoneksi.

- b. Bagi Penulis

Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan terutama dalam masalah akuntansi mengenai pengakuan pendapatan interkoneksi.